

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia telah memasuki masa penguatan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh pihak termasuk pemerintah dengan melakukan reformasi di segala bidang. Salah satu usaha menguatkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *good governance* (Darwis dan Chairunnisa 2013). Hal tersebut mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Kota Madiun sebagai salah satu daerah yang memiliki hak otonomi diwajibkan mempertanggungjawabkan kinerja kepada publik. Penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa menjadi perhatian serius bagi aparatur pemerintah Kota Madiun. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang berupa laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan

merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas.

Laporan keuangan pemerintah harus dapat membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan membandingkan kinerja keuangan aktual dengan standar akuntansi dan menilai kondisi keuangan, membantu tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas. Perbaikan pengelolaan keuangan terus dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun untuk mendapatkan kualitas laporan keuangan yang semakin baik, dengan mengawasi kualitas laporan keuangan instansi pemerintah. kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya Darwanis dan Chairunnisa (2013).

Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam rerangka konseptual akuntansi pemerintahan antara lain relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dapat dibandingkan (*comparability*), dan dapat dipahami (*understandability*). Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi

kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

Adanya kompetensi sumber daya manusia dapat mengetahui pemerintah telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif, dan efisien. Sehingga mendorong terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas yang bebas dari salah saji material dan pengertian yang menyesatkan Wati, Herawati, dan Sinarwati (2014).

Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, dalam hal ini laporan keuangan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku dan disajikan secara jujur dan lengkap dalam laporan keuangan pemerintah daerah Wati, dkk (2014).

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan dilakukannya pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Dalam menerapkan hal ini digunakan kebijakan akuntansi agar dapat mengatur akuntansi tersebut maka akan dapat menjamin konsistensi penyajian keuangan daerah yang dihasilkan Wati, dkk (2014).

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi

keuangan daerah memiliki peran yang penting dalam mewujudkan perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini mereplikasi penelitian Wati, dkk (2014). Perbedaan penelitian ini yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun, sedangkan penelitian Wati, dkk (2014) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengambil judul penelitian **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah/OPD di Kota Madiun).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris bahwa:

1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi ilmu akuntansi sektor publik secara umum, serta literatur mengenai kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan sektor publik.

### **3. Bagi peneliti selanjutnya**

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan sebagai studi komparatif bagi peneliti yang mendalami masalah ini di masa yang akan datang.

## **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, maka penulis menyajikan susunan penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar untuk membahas permasalahan yang akan diteliti, yaitu meliputi teori kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta kerangka konseptual atau model penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, lokasi dan waktu penelitian, data dan prosedur pengumpulan data; serta teknik analisis.

#### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan atas hasil penelitian.

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.